

Teori Konflik Kekuasaan dan Dinamika Politik di Indonesia

Shofiyya Mawaddah*, Imam Ibnu Hajar, Wasid

UIN Sunan Ampel Surabaya

03020221069@student.uinsby.ac.id

Abstrak: Teori konflik kekuasaan adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa konflik sosial merupakan hasil dari ketidaksetaraan, perbedaan kepentingan, dan persaingan antara kelompok atau individu yang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya dan kekuasaan. Teori ini juga menekankan peran konflik dalam memicu perubahan sosial yang lebih adil dan demokratis. Dinamika politik di Indonesia merupakan salah satu contoh penerapan teori konflik kekuasaan dalam kajian empiris. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan wilayah yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial antara kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa isu yang menjadi sumber konflik di Indonesia antara lain adalah ketimpangan ekonomi, penindasan politik, korupsi, gerakan separatisme, dan intoleransi. Dalam menghadapi konflik-konflik tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian, rekonsiliasi, dan transformasi sosial. Beberapa upaya tersebut antara lain adalah reformasi politik, desentralisasi, pemberantasan korupsi, dialog antar kelompok, dan penguatan demokrasi. Teori konflik kekuasaan dapat membantu kita memahami sumber, bentuk, dan konsekuensi konflik sosial di Indonesia, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Teori ini juga dapat memberikan pandangan kritis dan alternatif dalam melihat dan menyelesaikan konflik sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Konflik; Kekuasaan; Politik

PENDAHULUAN

Di Indonesia, konflik kekuasaan termanifestasi secara nyata dalam perebutan pengaruh antarpolitis, kelompok masyarakat, bahkan hingga di tingkat daerah. Dinamika ini mencerminkan kompleksitas lanskap politik yang diwarnai oleh pertarungan sengit untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam kerangka ini, pemahaman teori konflik kekuasaan menjadi kunci untuk menganalisis struktur politik dan distribusi kekuasaan di Indonesia. Teori konflik kekuasaan menyoroti ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, yang tercermin dalam polarisasi politik dan ketegangan di berbagai tingkatan.¹ Antar Pemain politik, terjadi persaingan intens untuk mendapatkan dukungan publik, mengontrol institusi-institusi kunci, dan mempengaruhi kebijakan.

Konflik kekuasaan seringkali terkait dengan isu-isu substansial seperti distribusi sumber daya, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Persaingan untuk mengontrol sumber daya, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya pemberantasan korupsi menjadi elemen krusial dalam dinamika kekuasaan.

¹ Aziz SR, A. (2019). Transformasi konflik dan peran pemerintah daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 28-41.

Pemahaman yang matang terhadap hubungan antara konflik kekuasaan dan isu-isu ini penting untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Dinamika kekuasaan sering mencerminkan keunikan dan kompleksitas masyarakat setempat. Perebutan kekuasaan di tingkat lokal dapat muncul dari dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang bersifat khas bagi daerah tersebut. Memahami dinamika ini membantu menciptakan solusi yang lebih tepat dan relevan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di tingkat lokal, yang pada gilirannya berkontribusi pada keseluruhan stabilitas negara.

Pentingnya memahami dinamika politik dan konflik kekuasaan di Indonesia tidak hanya mempengaruhi stabilitas internal, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada peran negara ini di tingkat regional dan internasional. Dengan posisi geopolitiknya yang strategis, Indonesia tidak hanya menjadi pemain utama dalam permasalahan internal, tetapi juga menjadi tokoh kunci dalam mengatasi isu-isu global yang melibatkan masalah lingkungan, perdagangan, dan diplomasi regional. Dalam konteks lingkup regional, pemahaman yang mendalam terhadap dinamika politik dan konflik kekuasaan di Indonesia memberikan landasan untuk menjelaskan sikap dan kebijakan yang diambil oleh negara ini dalam forum-forum regional. Dengan menjadi bagian dari solusi dalam isu-isu regional, Indonesia dapat memainkan peran yang konstruktif dalam membangun kerja sama dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Teori konflik kekuasaan bukan sekadar pandangan analitis dalam ilmu politik, lebih dari itu, teori ini menjadi kunci untuk memahami dinamika kompleks dalam masyarakat dan sistem politik. Fokus utama teori ini terletak pada persaingan yang tak terhindarkan dalam perebutan dan distribusi kekuasaan di antara berbagai kelompok dan individu dalam suatu sistem sosial dan politik.² Konsep ini menegaskan bahwa konflik bukanlah anomali, melainkan merupakan bagian integral dari dinamika sosial dan politik, terutama terkait dengan pertarungan kepentingan dan kekuasaan. Dalam konteks politik Indonesia, pemahaman mendalam terhadap teori konflik kekuasaan menjadi krusial. Indonesia, sebagai negara yang mengalami perubahan politik yang signifikan, terus menghadapi tantangan dalam distribusi kekuasaan dan dinamika politik internal. Pemahaman konsep konflik kekuasaan membuka mata terhadap

² Hayat, H. (2013). TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: INTERKONEKSI ISLAM DAN SOSIAL. HUNAFA: Jurnal Studia Islamika, 10(2), 269-292.

realitas ketidaksetaraan dan persaingan yang melekat dalam sistem politik, terutama dalam konteks pluralisme politik, dinamika suku, dan kompleksitas masyarakat yang beraneka ragam.

Dinamika persaingan yang terungkap melalui teori konflik kekuasaan memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas interaksi politik di negara ini. Partai politik, sebagai pemain utama di panggung politik Indonesia, secara terus-menerus berkompetisi untuk mendapatkan dukungan publik, mengonsolidasikan kekuatan politik, dan membentuk arah kebijakan. Kelompok masyarakat, baik yang berbasis etnis, agama, maupun kepentingan khusus, ikut serta dalam pertarungan untuk mempengaruhi keputusan politik. Elemen politik lainnya, termasuk lembaga-lembaga pemerintah dan sektor swasta, turut serta dalam dinamika persaingan ini untuk memperjuangkan posisi dan kepentingan mereka. Pemahaman terhadap dinamika persaingan ini membantu kita merinci bagaimana perubahan politik di Indonesia sering kali dipicu oleh pertarungan kepentingan dan perebutan kekuasaan yang kompleks. Pergeseran politik, perubahan kebijakan, dan dinamika pembentukan koalisi politik dapat dipahami lebih baik ketika ditempatkan dalam konteks teori konflik kekuasaan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya memberikan alat analisis konseptual, tetapi juga menjadi panduan praktis untuk memahami dinamika politik yang selalu berkembang di Indonesia.

Tujuan utama penulisan makalah ini adalah membuka pemahaman yang lebih mendalam terhadap persaingan kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan konflik politik yang melibatkan berbagai entitas di dalam konteks yang kompleks, yaitu Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif, makalah ini bertujuan untuk merinci dan menggali akar penyebab dinamika politik yang terus berkembang di negara ini. Dengan memfokuskan perhatian pada persaingan kekuasaan, makalah ini akan membahas bagaimana partai politik, kelompok masyarakat, dan elemen politik lainnya saling bersaing untuk memegang kendali atas kebijakan, sumber daya, dan pengaruh politik. Pemahaman yang mendalam terhadap distribusi kekuasaan ini menjadi landasan untuk memahami interaksi kompleks antara aktor politik dalam sistem politik Indonesia. Selain itu, makalah ini juga akan menggali konsep konflik politik dalam konteks Indonesia. Dengan memanfaatkan teori konflik kekuasaan sebagai alat analisis, penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang bagaimana

konflik kepentingan, polarisasi politik, dan pertarungan kekuasaan memainkan peran penting dalam membentuk peta politik Indonesia.

Ruang lingkup pembahasan melibatkan pemaparan konsep dasar teori konflik kekuasaan, sejarah politik Indonesia yang relevan, serta penerapannya dalam menganalisis perubahan politik dan perebutan kekuasaan di tingkat nasional dan lokal. Makalah ini juga akan membahas dampak dinamika politik terhadap stabilitas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan proses demokratisasi di Indonesia. Relevansi topik ini dalam konteks sosial, politik, dan akademis sangat penting. Secara sosial, pemahaman konflik kekuasaan membuka ruang untuk diskusi yang lebih terinformasi tentang dinamika politik yang memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tingkat politik, makalah ini memberikan wawasan yang mendalam kepada para pemangku kebijakan, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil tentang cara mengelola konflik kekuasaan dengan lebih efektif. Secara akademis, makalah ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan ilmuwan politik yang tertarik untuk mendalami teori konflik kekuasaan dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan pembahasan mengenai dinamika politik di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori konflik kekuasaan mendasarkan argumennya pada keyakinan bahwa konflik politik seringkali muncul akibat ketidaksetaraan dan persaingan dalam distribusi serta penggunaan kekuasaan di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Kekuasaan mengambil berbagai bentuk yang melibatkan dinamika ekonomi, politik, militer, dan budaya. Teori ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dapat menciptakan ketegangan dan pertarungan kepentingan di dalam masyarakat. Persaingan untuk memegang kendali atas kebijakan, sumber daya ekonomi, dan bahkan kendali atas narasi budaya menjadi elemen-elemen utama yang menciptakan konflik politik. Dalam pandangan ini, kekuasaan tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga melibatkan kontrol atas aspek-aspek lainnya dari kehidupan masyarakat. Kekuasaan ekonomi, misalnya, dapat menjadi sumber konflik ketika distribusi kekayaan tidak merata, menciptakan disparitas sosial dan ekonomi

yang mengakibatkan ketidakpuasan dan permusuhan. Kekuasaan politik melibatkan pertarungan antarpartai politik dan kelompok politik untuk mendominasi lanskap politik. Kekuasaan militer memainkan peran penting dalam situasi konflik internal maupun eksternal. Selain itu, kekuasaan budaya mencakup pengaruh dan kontrol atas norma-norma, nilai-nilai, dan identitas sosial yang dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat yang beragam.

Ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan ekonomi menciptakan disparitas yang nyata di antara berbagai kelompok sosial. Disparitas ekonomi, yang tercermin dalam ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, seringkali menjadi pemicu utama konflik politik. Fenomena ini bukan hanya menciptakan kesenjangan material, tetapi juga memunculkan ketegangan dan persaingan yang kompleks dalam perjuangan untuk mendapatkan dan mempertahankan kontrol atas kekayaan dan peluang ekonomi. Perbedaan ekonomi yang signifikan antara-kelompok sosial menciptakan ketidaksetaraan yang dapat merugikan kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi kunci, seperti pendidikan berkualitas, pekerjaan yang layak, dan modal keuangan, dapat menciptakan kesenjangan yang melebar antar-kelompok. Ketidaksetaraan ini menciptakan dinamika konflik, karena kelompok yang kurang mendapat manfaat dari distribusi kekayaan ekonomi merasa terpinggirkan dan tidak adil. Sebagai akibatnya, ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya menciptakan ketegangan antar-kelompok sosial, tetapi juga menjadi sumber potensial konflik politik yang meresahkan. Memahami dan mengatasi akar ketidaksetaraan ekonomi ini menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adil secara politik.

Ketidaksetaraan dalam kekuasaan politik melahirkan konflik yang terkait dengan perjuangan untuk memperoleh pengaruh dan kontrol dalam proses pembuatan kebijakan. Persaingan sengit antarpartai politik dan kelompok politik memegang peran sentral dalam membentuk dinamika politik di Indonesia.³ Pergulatan kekuasaan politik ini melibatkan berbagai aspek, termasuk persaingan untuk menduduki jabatan politik, mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan mengatur struktur kekuasaan di berbagai tingkatan pemerintahan. Persaingan politik di Indonesia, yang dipengaruhi

³ Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(1), 14-28.

oleh ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, sering kali menjadi panggung utama konflik. Partai politik bersaing untuk memenangkan dukungan publik, meraih kursi di parlemen, dan menguasai posisi kunci dalam pemerintahan. Kelompok politik dengan kepentingan khusus juga terlibat dalam pertarungan untuk mempengaruhi arah kebijakan sesuai dengan tujuan mereka.

Pertarungan untuk mendapatkan dan mempertahankan pengaruh dalam pembuatan kebijakan merupakan inti dari konflik politik yang berkembang. Ini mencakup perang ideologi, penentuan arah kebijakan publik, dan pengaruh terhadap keputusan-keputusan kunci yang membentuk hukum dan peraturan. Kelompok-kelompok dengan kekuasaan politik yang lebih besar cenderung mendikte arah kebijakan sesuai dengan agenda mereka, sementara kelompok yang kurang berkuasa berjuang untuk mendapatkan representasi dan pengakuan dalam proses pengambilan keputusan. Pada tingkat pemerintahan yang lebih lokal, persaingan untuk mengatur struktur kekuasaan dapat menciptakan ketegangan antar lembaga. Pergulatan ini mencakup penentuan peran dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pertarungan untuk mendominasi dalam tingkat kekuasaan yang lebih terlokalisasi.

Kekuasaan militer merupakan elemen krusial dalam teori konflik kekuasaan, dan sejarah politik Indonesia mencatat beberapa periode di mana kekuatan militer memiliki peran dominan dalam mengelola kebijakan politik. Dalam beberapa kasus, kekuasaan militer muncul sebagai kekuatan utama yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan, membentuk periode tertentu dalam sejarah politik Indonesia. Persaingan dan interaksi antara kekuasaan militer dan kekuasaan sipil seringkali menjadi sumber konflik politik yang signifikan. Saat kekuatan militer mendominasi lanskap politik, konflik sering muncul karena perbedaan pandangan dan tujuan antara aparat militer dan pemerintah sipil. Ketidakselarasan antara kepentingan militer dan aspirasi sipil dapat menciptakan ketegangan yang mendalam, terutama ketika militer memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik.

Konflik ini tidak hanya mencakup pertarungan untuk pengaruh dan kontrol atas kebijakan, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial yang dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan negara. Selain itu, kehadiran militer dalam kebijakan politik juga dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap

institusi politik secara umum, menciptakan tantangan tambahan dalam membangun sistem politik yang stabil dan demokratis. Dalam era reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam hubungan antara kekuasaan militer dan kekuasaan sipil, dengan upaya untuk mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis. Meskipun demikian, peran kekuatan militer tetap menjadi elemen sensitif dalam dinamika politik, dan pemahaman terhadap sejarah konflik yang melibatkan kekuasaan militer menjadi penting untuk merinci bagaimana elemen ini dapat mempengaruhi perkembangan politik di masa depan..

Konflik budaya muncul ketika kelompok-kelompok sosial bersaing untuk mempertahankan atau mengubah norma, nilai, dan identitas budaya. Dinamika ini melibatkan persaingan yang intens di antara kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan budaya yang berbeda di masyarakat. Perbedaan dalam interpretasi dan penafsiran nilai-nilai budaya menciptakan ketegangan yang kompleks, mencirikan perjuangan untuk menentukan arah dan bentuk budaya yang akan mendominasi. Persaingan ini bisa timbul dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan lokal hingga skala nasional, dan bahkan internasional. Kelompok-kelompok yang memiliki identitas budaya yang kuat seringkali merasa memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan melindungi warisan budaya mereka. Di sisi lain, kelompok-kelompok yang ingin mengubah atau merestrukturisasi norma dan nilai budaya mungkin mencari perubahan untuk mencerminkan perubahan sosial atau politik yang lebih luas.⁴ Dalam dinamika konflik budaya, seringkali terjadi penentangan terhadap aspek-aspek tertentu dari budaya, baik yang terkait dengan kebijakan publik, representasi media, atau tindakan-tindakan simbolis.⁵ Misalnya, konflik budaya dapat muncul dalam perdebatan seputar pendidikan, bahasa resmi, atau tatanan sosial tradisional. Perbedaan pendapat dan perspektif di dalam kelompok budaya tertentu dapat menciptakan konflik internal yang melibatkan pertanyaan tentang identitas kolektif dan arah budaya di masa depan.

Teori ini juga menekankan bahwa konflik politik di Indonesia dapat menjadi sarana untuk transformasi sosial yang lebih baik, asalkan konflik tersebut dapat

⁴ Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).

⁵ Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: dinamika dalam sejarah Nusantara. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 7(1), 88-95.

diselesaikan dengan cara yang demokratis, adil, dan damai. Konflik politik dianggap sebagai katalisator potensial untuk perubahan positif, memungkinkan terwujudnya perubahan kebijakan yang lebih inklusif, restrukturisasi struktur sosial yang lebih adil, atau bahkan perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianggap tidak adil. Konflik politik dianggap bukan hanya sebagai sumber ketegangan, tetapi juga sebagai peluang untuk menggali solusi yang lebih baik. Jika dikelola dengan bijak, konflik politik dapat memicu dialog yang mendalam, memunculkan perdebatan yang produktif, dan membuka pintu untuk perubahan yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Perubahan kebijakan dapat terjadi melalui negosiasi dan kompromi yang timbul selama proses penyelesaian konflik. Ketika pihak yang berkonflik dapat mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas, ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang. Selain itu, konflik politik yang selesai secara damai dan adil juga dapat menjadi momen untuk merestrukturisasi struktur sosial yang mungkin menyebabkan ketidaksetaraan. Proses demokratis dalam menyelesaikan konflik dapat membuka ruang untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama. Selama transformasi sosial ini, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang tidak adil dapat direvisi atau digantikan dengan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, konflik politik, ketika dikelola dengan bijak, dapat menjadi pendorong untuk perubahan yang membawa dampak positif dalam masyarakat dan mengarah pada pembentukan masyarakat yang lebih demokratis dan adil.

Konsep Penting dari Teori Konflik Kekuasaan dan Dinamika Politik di Indonesia

1. Kekuasaan

Kekuasaan dalam konteks teori ini diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan kehendaknya. Konsep ini mencerminkan dinamika hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Kekuasaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekuasaan politik dan ekonomi hingga kekuasaan sosial dan budaya. Teori ini membedakan antara kekuasaan positif dan kekuasaan negatif. Kekuasaan positif

adalah kekuasaan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan bersama dan memperbaiki kondisi bersama. Contohnya, partisipasi dalam proses keputusan demokratis adalah bentuk kekuasaan positif. Di sisi lain, kekuasaan negatif adalah kekuasaan yang digunakan untuk mendominasi atau menindas orang lain. Bentuk ini dapat mencakup penggunaan kekerasan, penindasan politik, atau penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk lain. Kekuasaan yang efektif memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi. Kekuasaan yang bersifat otoriter atau mengeksploitasi cenderung mendistorsi hubungan sosial dan menciptakan ketidaksetaraan.

2. Sumber Kekuasaan

Sumber kekuasaan merujuk pada faktor-faktor yang memberikan dasar atau legitimasi bagi kekuasaan. Konsep ini mengidentifikasi berbagai elemen yang menjadi pondasi keberlanjutan kekuasaan dalam suatu struktur sosial. Sumber kekuasaan ini dapat bervariasi dan memainkan peran kunci dalam menentukan karakter kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Teori ini membedakan antara sumber kekuasaan formal dan informal. Sumber kekuasaan formal adalah sumber kekuasaan yang berasal dari struktur hukum, peraturan, atau jabatan resmi. Contohnya termasuk posisi politik, kekuasaan eksekutif, atau kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tertentu. Di sisi lain, sumber kekuasaan informal adalah sumber kekuasaan yang berasal dari faktor-faktor seperti kepemilikan, keterampilan individu, pengetahuan, atau hubungan sosial. Sumber kekuasaan informal sering kali mencerminkan dinamika interpersonal dan kemampuan individu untuk mempengaruhi tanpa tergantung pada struktur formal. Sumber kekuasaan formal, meskipun dapat memberikan dasar yang jelas dan terdefinisi, kadang-kadang dapat memunculkan isu-isu terkait dengan penyalahgunaan dan ketidakadilan. Sumber kekuasaan informal, sementara itu, sering kali terkait dengan dinamika interpersonal dan kemampuan individu untuk membangun pengaruh berdasarkan kualitas pribadi. Analisis terhadap sumber kekuasaan membantu kita memahami bagaimana dan mengapa kekuasaan terdistribusi dalam suatu masyarakat, serta implikasinya terhadap dinamika politik dan sosial.

3. Konflik

Konflik dalam teori ini dipandang sebagai suatu proses sosial yang melibatkan pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang berbeda atau bertentangan. Konflik dianggap sebagai dinamika alamiah dalam interaksi manusia yang muncul dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Konflik dapat mengambil dua bentuk utama, yaitu konflik laten dan manifest. Konflik laten adalah konflik yang belum terlihat atau terungkap secara jelas. Ini mencakup perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan yang mungkin belum mencapai titik eskalasi. Sebaliknya, konflik manifest adalah konflik yang sudah terlihat atau terungkap secara terbuka. Konflik manifest dapat mencakup bentrokan fisik, perdebatan terbuka, atau bentuk-bentuk konfrontasi lainnya yang mudah diamati. Konflik tidak selalu bersifat statis, dan analisis terhadap dinamika konflik membantu kita memahami pergeseran-pergeseran dalam intensitas, penyebab, dan dampak konflik. Faktor-faktor seperti perubahan dalam struktur sosial, perubahan nilai masyarakat, atau pergeseran kekuasaan dapat mempengaruhi perkembangan konflik. Di sisi lain, konflik yang tidak teratasi dengan baik dapat menciptakan ketidakstabilan, ketegangan, atau bahkan kekerasan yang dapat merugikan masyarakat.

4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai transformasi dalam pola-pola perilaku, hubungan, organisasi, atau nilai-nilai yang terjadi dalam suatu sistem sosial. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perkembangan dan transformasi seiring waktu. Dua dimensi utama dalam konsep perubahan sosial yang diusung oleh teori ini adalah evolusioner dan revolusioner. Perubahan sosial evolusioner terjadi secara bertahap dan berkelanjutan, menggambarkan proses transformasi yang melibatkan perkembangan berangsur-angsur dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Ini mencerminkan adaptasi dan pertumbuhan sosial yang terjadi seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, perubahan sosial revolusioner terjadi secara cepat dan radikal, seringkali melibatkan pemutusan dari status quo dan munculnya struktur sosial yang baru dalam waktu singkat. Dengan demikian, konsep perubahan sosial dalam teori ini memberikan landasan untuk

memahami dinamika masyarakat dalam menghadapi transformasi. Konsep ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas proses perubahan sosial, memberikan landasan untuk merinci faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta memahami implikasi jangka panjangnya terhadap struktur sosial dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.⁶

Contoh Konflik Politik yang Terjadi di Indonesia

1. Konflik antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Konflik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dinamika politik yang seringkali mewarnai struktur pemerintahan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu contoh konkretnya adalah konflik yang terjadi terkait otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, proses desentralisasi dimulai dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Konflik antara pemerintah pusat dan daerah mencerminkan kompleksitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses peralihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah tidak selalu berjalan mulus. Salah satu dampak dari kebijakan otonomi daerah adalah munculnya perselisihan terkait pembagian sumber daya, peran keuangan, dan wewenang antara kedua tingkat pemerintahan. Dalam dinamika ini, terdapat pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat yang berupaya mempertahankan kontrol dan otoritas nasionalnya, dan pemerintah daerah yang ingin mengelola sumber daya dan kebijakan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka.

Konflik muncul ketika pemerintah daerah berusaha memperjuangkan hak-hak otonominya. Salah satu sumber konflik adalah alokasi dana yang dianggap tidak proporsional dan tidak memadai oleh beberapa pemerintah daerah. Terdapat perbedaan persepsi mengenai sejauh mana otonomi yang seharusnya diberikan kepada daerah, dan hal ini menjadi pemicu konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik ini juga terkait dengan perbedaan pandangan terkait regulasi dan kebijakan nasional yang dapat membatasi kewenangan daerah. Beberapa daerah merasa bahwa pemerintah pusat terlalu campur tangan dalam urusan lokal, sementara pemerintah

⁶Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*, 1(1), 11-15.

pusat berpendapat bahwa kontrol yang ketat diperlukan untuk memastikan keseragaman kebijakan nasional. Dampak dari konflik antara pemerintah pusat dan daerah dapat melibatkan ketidakseimbangan pembangunan, ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya, serta kesulitan dalam implementasi kebijakan secara efektif. Proses penyelesaian konflik seringkali membutuhkan dialog intensif, pembahasan regulasi yang lebih jelas, dan kesepahaman bersama untuk mencapai keseimbangan antara otonomi daerah dan kepentingan nasional. Dengan demikian, konflik antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mencerminkan tantangan kompleks dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif, adil, dan efektif.

2. Konflik antara Partai Politik

Salah satu contoh konflik antara partai politik yang mencuat dalam ranah politik Indonesia adalah konflik internal di sebuah partai besar. Ambisi politik, perbedaan pandangan ideologis, dan persaingan untuk menduduki posisi strategis seringkali menjadi pemicu konflik di dalam sebuah partai. Sebagai ilustrasi, kita dapat merujuk pada konflik yang terjadi di salah satu partai politik besar pada saat pemilihan umum. Dalam konteks ini, perselisihan internal antar faksi dalam partai menciptakan ketegangan politik yang dapat merugikan stabilitas internal partai dan mengancam kesatuan visi-misi partai. Perpecahan terjadi ketika beberapa anggota partai memiliki pandangan yang berbeda mengenai arah kebijakan partai atau ketika terdapat persaingan yang intens untuk mencalonkan kandidat partai di tingkat tertentu.

Konflik antara partai politik tidak hanya terjadi di tingkat internal, tetapi juga dapat melibatkan persaingan antar partai di level nasional.⁷ Pada tingkat ini, persaingan politik seringkali mendorong partai politik untuk saling bersaing secara tajam dalam merebut dukungan masyarakat. Kontroversi, serangan personal, dan pertarungan ideologis menjadi ciri khas dari konflik politik antar partai. Dampak dari konflik antar partai dapat mencakup polarisasi masyarakat, penurunan kepercayaan publik terhadap politik, dan terkadang ketidakstabilan politik yang dapat menghambat proses pembuatan kebijakan. Penyelesaian konflik antar partai seringkali memerlukan

⁷Nur, M., Usman, U., & Safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilu di Aceh, Tahun 2017. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(2), 140-149.

dialog yang intensif, kesediaan untuk berkompromi, dan penegakan tata kelola internal yang kuat dalam masing-masing partai.

Konflik ini terjadi karena adanya persaingan dalam memperebutkan kekuasaan politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dinamika persaingan ini dapat mencakup rivalitas antarpolitis, pertarungan untuk mendominasi struktur kebijakan, dan upaya kelompok masyarakat untuk mempengaruhi arah kebijakan. Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada kompetisi politik yang sehat, tetapi juga dapat memunculkan polarisasi di antara masyarakat. Polarisasi politik menjadi semakin nyata karena konflik kekuasaan memperkuat klaim dan identitas yang berbeda. Pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan politik cenderung memperkuat perbedaan dan menonjolkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau visi yang diajukan oleh lawan politiknya. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan meningkatkan divisi di antara pendukung berbagai faksi politik.

Konflik kekuasaan dapat menciptakan konflik kepentingan yang dapat berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan politik mungkin fokus pada kepentingan kelompok atau partainya sendiri, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan umum. Ini bisa mengakibatkan perdebatan yang sengit terkait kebijakan, alokasi sumber daya, dan isu-isu krusial lainnya. Di tingkat ekstrem, konflik kekuasaan yang tidak teratasi dengan baik dapat melahirkan kekerasan politik. Saat rivalitas politik mencapai puncaknya, kemungkinan terjadinya konflik fisik atau bentrokan antar pendukung kelompok politik dapat meningkat. Ini bisa merugikan stabilitas sosial dan menghambat proses demokrasi yang sehat.

3. Konflik antara Kelompok Sosial

Konflik sosial di Indonesia merupakan cerminan dari keragaman masyarakatnya yang kaya akan berbagai lapisan agama, etnis, budaya, dan kelas sosial. Perbedaan-perbedaan ini, yang seharusnya menjadi kekayaan dan kekuatan, terkadang malah menjadi sumber ketidaksetaraan dan ketegangan yang dapat memicu konflik. Konflik semacam ini, yang muncul akibat adanya perbedaan atau ketidaksetaraan dalam agama, etnis, budaya, atau kelas sosial, dapat memiliki dampak yang signifikan pada dinamika sosial, mencakup diskriminasi, intoleransi, bahkan konflik horizontal

di beberapa daerah. Salah satu sumber konflik sosial yang paling mencolok adalah perbedaan agama. Indonesia, sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, melibatkan berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Meskipun Indonesia dikenal dengan semangat toleransinya, namun konflik antaragama masih terjadi di beberapa wilayah. Misalnya, ketegangan antara kelompok agama mayoritas dan minoritas dapat muncul akibat perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, atau bahkan karena faktor-faktor politik tertentu. Dalam beberapa kasus, konflik antaragama dapat berkembang menjadi tindakan diskriminatif, pengucilan, atau bahkan kekerasan antarumat beragama.

Selain perbedaan agama, konflik juga sering kali muncul akibat ketidaksetaraan dalam hal etnis. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda, dengan Jawa sebagai kelompok etnis terbesar. Tidak jarang, ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi dapat menjadi sumber ketegangan antar etnis. Konflik etnis ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari persaingan ekonomi yang ketat hingga ketegangan etnis yang mendalam, yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik horizontal atau perselisihan antarwarga. Aspek budaya juga dapat menjadi pemicu konflik sosial di Indonesia. Perbedaan budaya, baik dalam norma-norma sosial, bahasa, adat istiadat, atau cara pandang hidup, dapat menciptakan ketidaksepahaman dan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Konflik budaya ini dapat meruncing menjadi bentuk diskriminasi atau bahkan intoleransi antarbudaya, yang menghambat proses integrasi dan harmonisasi di tingkat sosial. Ketidaksetaraan dalam kelas sosial juga menjadi pemicu potensial konflik di Indonesia. Adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kelompok sosial tertentu dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik kelas sosial ini dapat muncul dalam bentuk perjuangan untuk hak-hak ekonomi yang lebih adil, distribusi sumber daya yang merata, atau bahkan dalam bentuk gerakan sosial yang mengadvokasi keadilan sosial. Dampak dari konflik sosial yang muncul akibat perbedaan atau ketidaksetaraan ini dapat sangat merugikan masyarakat. Diskriminasi dan intoleransi dapat menghambat

perkembangan sosial dan ekonomi, sementara konflik horizontal dapat mengancam keamanan dan stabilitas regional.⁸

Dalam menanggapi konflik sosial, diperlukan upaya-upaya yang bersifat preventif, resolutive, dan transformatif. Konsep ini mencerminkan pendekatan holistik dalam menangani konflik, mengakui kompleksitasnya, dan menawarkan strategi yang komprehensif untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Upaya preventif menjadi langkah pertama yang krusial dalam manajemen konflik. Tujuan utama dari upaya ini adalah mencegah atau mengurangi potensi konflik sebelum mencapai titik kritis. Meningkatkan dialog, kerjasama, dan toleransi antara pihak-pihak yang berkonflik adalah langkah preventif yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami perbedaan, menghargai keberagaman, dan membangun fondasi yang kuat untuk mengelola ketegangan yang mungkin muncul. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam upaya preventif ini. Mendorong inklusi kurikulum yang menekankan nilai-nilai toleransi, dialog antarbudaya, dan pemahaman terhadap keberagaman dapat membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya kerjasama dan keberagaman dalam masyarakat. Program-program ini dapat membantu menghindari stereotype, prasangka, dan persepsi negatif yang dapat menjadi pemicu potensial konflik.

Selanjutnya upaya resolutive adalah langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan atau mengakhiri konflik yang sudah terjadi. Negosiasi, mediasi, dan arbitrase adalah metode-metode yang dapat digunakan untuk mencapai solusi damai. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi perundingan yang konstruktif, dan mencari kesepakatan bersama yang dapat mengakhiri ketegangan. Upaya resolutive juga memerlukan kehadiran mediator yang kompeten dan netral, yang dapat membantu memfasilitasi dialog dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian konflik. Keterlibatan komunitas internasional atau organisasi-organisasi perdamaian dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan proses resolusi konflik yang efektif. Pentingnya keadilan sosial dan demokrasi dalam

⁸Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang memengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(1).

masyarakat menjadi dasar dari upaya transformatif. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara langsung, tetapi juga untuk mengubah atau memperbaiki kondisi sosial yang menjadi akar penyebab konflik. Reformasi politik, ekonomi, sosial yang lebih adil dan demokratis adalah bagian integral dari strategi ini.

Reformasi politik dapat mencakup perbaikan pada sistem hukum, tata kelola yang lebih transparan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Reformasi ekonomi fokus pada redistribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Sementara itu, reformasi sosial dapat mencakup program-program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat. Dalam konteks transformatif, membangun kapasitas lokal juga menjadi prioritas. Memperkuat lembaga-lembaga masyarakat sipil, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan mereka sendiri adalah langkah-langkah yang dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan.⁹

KESIMPULAN

Konsep ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan dan sumber daya dapat diidentifikasi dalam konteks Indonesia, terutama melibatkan persaingan antarpolitik dan konflik antaragama. Persaingan antar partai mencerminkan ambisi politik dan perebutan kekuasaan yang terus-menerus, sedangkan konflik antaragama dapat menciptakan ketegangan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Teori konflik kekuasaan juga menggambarkan relevansinya dalam memahami konsep distribusi kekuasaan di Indonesia. Melalui pemahaman ini, kita dapat meresapi bagaimana kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dapat memengaruhi distribusi kekuasaan di berbagai tingkatan. Ini mencakup tantangan-tantangan dalam otonomi daerah, ketidaksetaraan etnis, serta dinamika kekuasaan di tingkat nasional. Pentingnya teori ini juga tercermin dalam analisis konflik dan ketegangan yang mungkin timbul dalam masyarakat. Contohnya, konflik antara pemerintah pusat dan daerah atau antarpolitik seringkali mencerminkan perjuangan kekuasaan yang mendasari teori konflik kekuasaan. Mengetahui akar penyebab konflik semacam ini

⁹ Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(1), 21-35.

memungkinkan pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan inklusif. Kemudian, mengenai konsep latah dan perilaku politik di Indonesia, terdapat gambaran yang jelas mengenai dinamika sosial dan budaya. Analisis mengenai faktor-faktor penyebab latah dan diversitas latah memberikan wawasan tentang kompleksitas perilaku politik di tengah masyarakat. Pemahaman ini memiliki relevansi dalam merancang kebijakan dan pendekatan yang lebih holistik terhadap dinamika politik yang terjadi.

Kesimpulannya, teori konflik kekuasaan adalah alat analisis yang kuat dalam membaca dan memahami dinamika politik di Indonesia. Dalam makalah ini, telah diuraikan bagaimana teori ini mencakup perbedaan dan persaingan dalam distribusi kekuasaan, serta bagaimana konflik politik di Indonesia dapat dikaji melalui lensa teori ini. Dengan pemahaman yang lebih dalam terhadap teori ini, kita dapat menggali solusi-solusi yang lebih efektif untuk menangani konflik politik, memperbaiki distribusi kekuasaan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Oleh karena itu, teori konflik kekuasaan memberikan landasan pemikiran yang substansial untuk merespons dan membentuk arah kebijakan politik di Indonesia.

REFERENSI

- Aziz SR, A. (2019). Transformasi konflik dan peran pemerintah daerah. *Journal of Urban Sociology*,
- Hayat, H. (2013). TEORI KONFLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: INTERKONEKSI ISLAM DAN SOSIAL. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 10
- Nugroho, A. C. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2).
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*,
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).
- Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: dinamika dalam sejarah Nusantara.

- Jurnal Sejarah dan Budaya, 7(1),
- Fadilah, G. (2021). Implikasi Teori-teori Konflik terhadap Realitas Sosial Masa Kini: Tinjauan Pemikiran Para Tokoh Sosiologi. *Journal of Society and Development*,
- Nur, M., Usman, U., & Safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*,
- Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(1).
- Akmal, D. U. (2021). Politik Reformasi Hukum: Pembentukan Sistem Hukum Nasional Yang Diharapkan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 8(1).